



LKPD TA 2023 Pemerintah Provinsi NTT dapat Opini WTP ke 9 Kali

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (2) dan (3), BPK RI melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dengan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 kepada DPRD Provinsi NTT dan Gubernur NTT.

Opini yang diberikan atas LKPD Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, Pemerintah Provinsi NTT telah 9 kali secara berturut-turut mendapatkan opini WTP sejak LKPD TA 2015 sampai dengan sekarang.

Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Provinsi NTT TA 2023 diserahkan oleh Anggota VI BPK RI (**Prof. Dr. Pius Lustrilnanang S.IP., M.Si., CSFA, CFA**) kepada Ketua DPRD Provinsi NTT (**Ir. Emelia Julia Nomleni**) dan Pj. Gubernur NTT (**Bapak Ayodhia Gehak Lakunamang Kalake, S.H., M.D.C.**) dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi NTT.

Walaupun opini yang diperoleh WTP, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya terkait:

1. Pelaksanaan paket pekerjaan yang bersumber dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran berupa kekurangan volume pekerjaan senilai Rp561,66 juta dan harga satuan timpang senilai Rp104,99 serta potensi kelebihan pembayaran senilai Rp97,73 juta
2. Penatausahaan Dana BOS pada aplikasi ARKAS belum dilaksanakan secara tertib oleh Bendahara Sekolah, sehingga mengakibatkan pembukuan dalam ARKAS belum sepenuhnya dapat dijadikan alat untuk melakukan verifikasi dan validasi transaksi penggunaan Dana BOS.
3. Penatausahaan Aset Tetap masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan suatu aplikasi atau sistem informasi terpadu, sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko operasional dalam akurasi pencatatan dan perhitungan nilai kapitalisasi serta penyusutan Aset Tetap.

Permasalahan-permasalahan tersebut bersifat tidak material atau tidak mempengaruhi kewajaran LKPD TA 2023, sehingga BPK tetap memberikan opini WTP.

Selain itu, BPK juga menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi NTT Tahun 2023 yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada Ketua DPRD Provinsi NTT dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD serta kepada Gubernur NTT dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan APBD Kabupaten/kota.

BPK mengharapkan Pemerintah Provinsi NTT dapat mempertahankan opini WTP di masa mendatang serta menjadi motivasi dan pendorong bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTT untuk juga mempertahankan opini WTP. Lebih lanjut opini WTP menjadi dasar bagi Pemda agar senantiasa menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT

Informasi lebih lanjut:

Humas BPK Perwakilan Provinsi NTT
Jl. W.J. Lamentik No.91, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Email : perwakilan.ntt@bpk.go.id